

LAPORAN AKHIR

**PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
(SP2DK) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya



Oleh :

TALITHA RHEA SERENA

01010582226070

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS
DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh :

TALITHA RHEA SERENA

01010582226070

Palembang, 22 Juli 2025

Mengetahui,

Koordinasi Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rina'.

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
NIM : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja/ Magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 22 Juli 2025
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
NIM : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma-III Akuntansi,



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG

Nama : Talitha Rhea Serena
NIM : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Palembang, 22 Juli 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
NIM : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi,



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

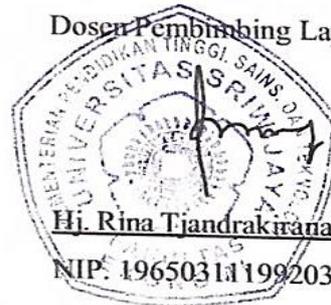
LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
NIM : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Palembang, 22 Juli 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP: 196503111992032002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Talitha Rhea Serena
Nim : 01010582226070
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul “Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat” ini adalah benar- benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 24 Juli 2025

Yang menyatakan,



Talitha Rhea Serena

NIM. 01010582226070

ABSTRAK

Laporan Akhir yang berjudul prosedur penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Laporan Akhir ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan teknik wawancara kepada *Account Representative* dalam pelaksanaan prosedur penerbitan SP2DK secara langsung dimulai dari pengumpulan data, penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), hingga penerbitan surat tersebut. Penulis juga mengamati peran *Account Representative (AR)* dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mengoptimalkan pengawasan perpajakan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur penerbitan SP2DK di KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Surat Edaran SE-05/PJ/2022. Namun, beberapa tantangan seperti kesulitan dalam pengumpulan data yang tidak terorganisir dengan baik dan keterbatasan dalam menjangkau Wajib Pajak yang tidak masuk dalam daftar prioritas pengawasan menjadi hambatan dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat sistem pengumpulan data melalui digitalisasi, memperluas jangkauan pengawasan, serta memperbaiki prosedur untuk meningkatkan efektivitas penerbitan SP2DK dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci : SP2DK, Account Representative, Kepatuhan Wajib Pajak.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,



Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

ABSTRACT

The final report is titled "The Procedure for Issuing a Request for Explanation on Data and/or Information (SP2DK) at KPP Pratama Palembang Ilir Barat." This report was conducted based on factual observations regarding the types of data collection used, namely documentation and interview techniques with account representatives in the implementation of SP2DK issuance procedures. The process was observed directly, from data collection and the preparation of the Monitoring Priority List (DPP) to the issuance of the letter. The writer also observed the role of the account representative (AR) in identifying non-compliance and optimizing tax supervision.

Observations show that the procedure for issuing SP2DK at KPP Pratama Palembang Ilir Barat has been carried out in accordance with applicable regulations, particularly Circular Letter SE-05/PJ/2022. However, several challenges—such as difficulties in collecting poorly organized data and limitations in reaching taxpayers who are not included in the monitoring priority list—pose obstacles in the supervision process. Therefore, it is recommended to strengthen the data collection system through digitalization, expand the scope of supervision, and improve procedures to enhance the effectiveness of SP2DK issuance and support increased tax compliance in Indonesia.

Keywords : SP2DK, Account Representative, Taxpayer Compliance.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,



Hi. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hi. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir magang yang berjudul **“Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan ini disusun untuk mendalami dan menganalisis Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat ujian Komprehensif program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan laporan magang ini, saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini. Maka saya ucapkan rasa hormat dan Terima Kasih kepada :

- Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
- Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Agil Novriansa, S.E., M.SC., AK., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Diploma III.
- Ibu Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Laporan akhir sekaligus Koordinator Program Studi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama penulisan laporan akhir.
- Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Akademik Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Bapak Muhammad Fathoni, selaku Dosen Pembimbing di tempat magang, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

- Bapak dan Ibu Kepala seksi pengawasan beserta seluruh kakak-kakak *Account Representative* yang telah memberikan informasi, data, dan wawasan yang sangat membantu dalam pembuatan laporan akhir ini
- Orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material selama proses penyusunan laporan ini.
- Rekan-rekan semasa perkuliahan (Caca, Gita, Tami, Nasywa, Nana, Lala, Suci) dan rekan magang (Caca, Nazhif, Haikal, Nasywa, Nana, Agung, Kai, Septi) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta mendukung satu sama lain selama masa magang berlangsung.
- Caca, Ubit, Nandas, Nadiyah (komeng) yang selalu menemani dari kecil sampai sekarang dan memberikan dukungan emosional untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam penyusunan laporan ini.
- Untuk diriku sendiri yang sudah berusaha keras dan sabar dalam menyelesaikan laporan akhir ini, meskipun banyak tantangan yang dihadapi sepanjang prosesnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan laporan ini penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi almamater dan juga para pembaca

Palembang, 15 Mei 2025

Talitha Rhea Serena
NIM. 01010582226070

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Pengamatan	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI & TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat	6
2.1.1 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	6
2.1.2 Logo Instansi	7
2.1.3 Struktur Organisasi	9
2.1.4 Pembagian Tugas dan Wewenang	9
2.2 Tinjaun Pustaka	17
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	22
3.1 Pelaksanaan Magang	22
3.1.1 Kegiatan Magang	23

3.1.1.1	Deksripsi Kegiatan Magang	23
3.1.2	Bukti Magang	28
3.2	Hasil Fokus Pengamatan	30
3.2.1	Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan	31
3.2.1.1	Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	31
3.2.1.2	Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan	33
3.2.1.3	Analisis Data Wajib Pajak	34
3.2.1.4	Penyusunan Draft SP2DK	35
3.2.1.5	Review dan Persetujuan Kepala Seksi	36
3.2.1.6	Pengiriman SP2DK ke Wajib Pajak	36
3.2.2	Analisis dan Pembahasan Masalah	39
3.2.2.1	Penilaian terhadap Kesesuaian Prosedur Identifikasi Wajib Pajak (WP)	39
3.2.2.2	Tantangan dan hambatan	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		43
4.1	Kesimpulan	43
4.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi Kegiatan Magang di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Seksi Pengawasan

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan kesesuaian Prosedur SP2DK terhadap SE-05/PJ/2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo DJP
Gambar 2.2	Bagan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Gambar 3.1	Pengenalan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
Gambar 3.2	Proses pembuatan NPWP secara pos
Gambar 3.3	Proses merekap surat keluar
Gambar 3.4	Proses merekap data penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
Gambar 3.5	Proses merekap Rekening Koran
Gambar 3.6	Flowchart Prosedur Penerbitan SP2DK
Gambar 3.7	Menu Monitoring DPP Kolaboratif
Gambar 3.8	Menu DPP Adjustment
Gambar 3.9	Kertas kerja penelitian
Gambar 3.10	Menu data pemicu
Gambar 3.11	Pratinjau SP2DK
Gambar 3.12	Menu kesimpulan
Gambar 3.13	Menu notifikasi Laporan Hasil Penelitian
Gambar 3.14	Menu Laporan Hasil Penelitian
Gambar 3.15	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
LEMBAR PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
Nim : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,
Koordinasi Program Studi
Diploma III Akuntansi,



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, sekitar 82,4% dari total penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Namun, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 97,2% dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Meskipun angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,5%, kondisi tersebut tetap mengindikasikan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam upaya memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran kepatuhan para Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu bertindak cepat dalam menanggapi potensi ketidakpatuhan pajak. Kondisi ini sangat penting mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Ketidakpatuhan pajak di Indonesia sering kali berasal dari ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku, serta adanya persepsi bahwa penghindaran pajak adalah hal yang wajar. Hal ini diperburuk dengan adanya ketidakjelasan informasi dan proses yang membingungkan dalam pelaporan pajak (Dewi & Rahmawati, 2023). Kesadaran pajak di kalangan masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan data otoritas perpajakan Indonesia tahun 2021, tercatat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar hanya mencakup sekitar 9% dari total populasi Indonesia, meskipun penerimaan pajak mencapai Rp1,54 triliun pada tahun 2020. Dalam konteks perpajakan, ketidakpatuhan sering terjadi karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak, penghindaran pajak yang tidak sesuai ketentuan, serta ketidaksesuaian laporan keuangan dengan data yang dimiliki otoritas pajak. Selain itu, lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas juga menjadi faktor yang memperburuk tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, dalam

regulasi dan hukum, ketidakpatuhan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, perubahan regulasi yang terlalu cepat, serta kurangnya transparansi dalam implementasi kebijakan. Sistem perpajakan yang terlalu rumit sering kali menjadi hambatan dalam kepatuhan pajak. Banyak Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan yang sering berubah, prosedur pelaporan yang panjang, serta persyaratan administrasi yang membingungkan. Akibatnya, ketidakpatuhan dapat terjadi baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan untuk menghindari proses yang dianggap terlalu sulit. Tingginya tingkat ketidakpatuhan menuntut peningkatan pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan secara lebih maksimal, khususnya oleh otoritas perpajakan Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, DJP menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh klarifikasi atas data atau menggali informasi yang mengarah pada potensi pajak dari Wajib Pajak. SP2DK merupakan salah satu mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Seksi Pengawasan bertugas memantau kepatuhan Wajib Pajak, menganalisis data perpajakan, serta menindaklanjuti temuan yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Selain Seksi Pengawasan, Account Representative (AR) juga memiliki peran penting dalam pengawasan perpajakan. Account Representative (AR) adalah pegawai DJP yang bertanggung jawab atas pengawasan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak di bawah tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Account Representative (AR) menganalisis laporan pajak, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, serta memberikan imbauan atau permintaan klarifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah penerbitan SP2DK. SP2DK berfungsi untuk meminta klarifikasi atas data atau informasi yang dimiliki DJP yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau potensi selisih kurang dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memberikan respons yang memadai dan dapat menjelaskan perbedaan data yang ditemukan, proses

pengawasan dapat dihentikan tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Namun, jika Wajib Pajak tidak menanggapi atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai, DJP dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan pajak. Tahap ini berpotensi menghasilkan ketetapan pajak dengan konsekuensi hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, SP2DK menjadi instrumen penting bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sekaligus mencegah potensi pelanggaran dalam pelaporan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini sebagai kesempatan untuk mempelajari dan menerapkan pengalaman yang diperoleh selama magang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Dengan pengamatan langsung, penulis bermaksud menyajikan laporan akhir dalam bentuk yang akademis dan praktis. Dari pengamatan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa SP2DK merupakan alat yang penting dalam mengoptimalkan pengawasan perpajakan di Indonesia. Selain itu, SP2DK juga berfungsi sebagai instrumen yang tidak semata-mata ditujukan untuk upaya peningkatan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil judul "Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat."

1.2 Fokus Pengamatan

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, Fokus pengamatan dalam penulisan ini diarahkan pada pemahaman terhadap prosedur penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilaksanakan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis akan mengamati tahapan awal yang harus dilakukan sebelum penerbitan SP2DK, termasuk proses pengumpulan data yang diperlukan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan jenis data yang harus dikumpulkan oleh Account Representative (AR) dan bagaimana proses analisis data Wajib Pajak sehingga data tersebut dapat menjadi dasar bagi AR untuk menerbitkan SP2DK. Penulis juga akan menguraikan durasi yang diperlukan dalam proses

penerbitan SP2DK, serta berapa lama proses yang diperlukan oleh AR untuk meneliti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), yang menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan demikian, penulis akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana AR berperan dalam menilai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan bagaimana proses pengumpulan data tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang Prosedur penerbitan SP2DK pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui tahapan awal serta langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data Wajib Pajak sebelum penerbitan SP2DK.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Account Representative (AR)* mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, terutama pada penerapan teori yang diberikan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta menumbuhkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi dalam penerapannya di dunia kerja.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang

Dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi atas hasil kinerja sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja ke depannya. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Bagi Universitas Sriwijaya

Dapat memudahkan dalam tahapan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Laporan ini dapat menjadi bahan ajar yang berguna bagi mahasiswa lain, serta mencerminkan komitmen fakultas dalam membekali lulusannya keahlian praktis serta pemahaman yang komprehensif terkait sistem perpajakan, termasuk peran SP2DK dalam kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R., & Rahmawati, T. (2023). *Penerimaan Pajak dan Tantangan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 12(2), 145-160.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2022). Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2021 tentang Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Yusranaditya, R., & Aresteria, M. (2024). Pemahaman E-Filing, Peran Pelayanan Account Representative dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1527–1542.